

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Akbar, Husaini Usman dan Purnomo Setiady, 2003, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : Bumi Aksara
- Akib, Muhammad, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta : Rajagrafindo Persada
- Amsyari, Fuad, 1981, *Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press
- BPS Kabupaten Kediri, 2018, *Kecamatan Badas Dalam Angka Tahun 2018*, Kediri: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri.
- Danusaputro, Stephanus Mudrajat, 1986, *Hukum lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Bandung: Bina Cipta
- Hardjasoemantri, Koesna, 2005, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Lubis, T. Mulya, 1993, *Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat Dunia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Makara, Muhammad Taufik, 2006, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta : PT Indeks Kelompok Gramedia
- Muhtaj, Majda El, 2009, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta : Rajawali Press
- Nasution, Johan Bahder, 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Prasetyo, Yosep Adi, 2012, *Hak EKOSOB dan Kewajiban Negara*, Yogyakarta: PUSHAM UII
- Qamar, Nurul, 2013, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtstaat)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Rahayu, 2013, *Hukum Hak Asasi Manusia di Era Global: Tantangan Implementasinya di Indonesia*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

\_\_\_\_\_, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

\_\_\_\_\_, 2018, *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Globalisasi*, Semarang : Undip Press Semarang

Ruray, Syaiful Bahri, 2012, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*, Bandung: Alumni

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press

Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Wardhana, Wisnu Arya, 2004, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Yogyakarta: Andi Offset

Wijaya, Sastra Tresna, 2000, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta : Rineka Cipta

#### **Skripsi:**

Gitta Vania, 2018, *Kewajiban Negara dalam Memenuhi Hak Atas Air Bagi Masyarakat Kota Bekasi Sebagai Dampak Tercemarnya Sungai Bekasi*, Semarang: Universitas Diponegoro.

#### **Jurnal:**

Dinarjati Eka Puspitasari, *Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)*, *Mimbar Hukum* Volume 21, Nomor 1, Februari 2009, diakses dari <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16254>

Fajri Fadillah, *Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat Dalam Konteks Mutu Udara Jakarta*, *Seri Lembar Informasi*, Desember 2018, diakses dari <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Brief-ICEL-Hak-Atas-Lingkungan-Hidup-yang-Baik-dan-Sehat-dalam-Konteks-Mutu-Udara-Jakarta.pdf>

Richard W. Vaas, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Indonesia*, *Jurnal Sasi* Vol. 20 No.1, Januari 2014, diakses dari [https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_ink.php?id=1047](https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=1047)

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

UUD NRI Tahun 1945

*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)

*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*  
*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*  
*The Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment*  
 1972 (Deklarasi Stockholm)  
*United Nations Conference on Environment and Development 1992 (Deklarasi Rio de Janeiro)*  
*Bali Declaration on Population and Sustainable Development (Deklarasi Bali 1992)*  
*Rio Declaration on Sustainable Development 2012 (Deklarasi Rio de Janeiro 2012)*  
*World Summit on Sustainable Development 2002 (Deklarasi Johannesburg)*  
 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup  
 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup  
 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  
 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air  
 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara  
 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017  
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia  
 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum  
 Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air

**Internet dan Wawancara:**

<http://news.metrotvnews.com/read/2014/12/18/333650/luburan-lumpur-lapindo-mencapai-luas-650-hektare> diakses pada 16 Oktober 2018

<http://jatim.sindonews.com/read/3745/1/aktivitas-pt-mahatex-dihentikan-warga-diduga-cemari-lingkungan-1543068706/> diakses pada 20 Desember 2018

<http://surabaya.tribunnews.com/2018/11/23/warga-badas-kediri-keluhkan-kebocoran-limbah-pt-mahatex-indonesia> diakses pada 20 Desember 2018

<http://surabaya.tribunnews.com/2018/11/23/limbahnya-diprotas-warga-pt-mahatex-janji-benahi-ipal> diakses pada 20 Desember 2018

Achmad Syaifuddin S.T., selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri, wawancara dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019.

Siti Romdiyah, selaku anggota PKK Desa Badas, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019.

Eko Siswanto, selaku masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan sungai Pohblembem Desa Badas, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Maret 2019.

Suyanto, selaku masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan sungai Pohblembem Desa Badas, wawancara dilakukan pada tanggal 30 Mei 2019.

# LAMPIRAN